

PELAKSANAAN APLIKASI *SIAPKE PATI* DALAM PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN EKSTREM DAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN PATI TAHUN 2024

Rofi Ramadani¹, Dewi Erowati²

Email: rofiramadani@students.undip.ac.id

¹⁾²⁾Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Pati. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan kerangka *policy design failure* dari B. Guy Peters serta konsep *fragmented state* dari Ronan Paddison. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *SIAPKE PATI* tidak berfungsi sebagai instrumen utama kebijakan, melainkan hanya sebagai alat administratif, karena tidak terintegrasi dalam proses inti pengelolaan data dan distribusi bantuan. Kondisi ini mencerminkan *policy failure* akibat ketidaktepatan instrumen, yang diperkuat oleh *governance failure* berupa lemahnya regulasi, koordinasi, dan pengawasan. Lebih lanjut, akumulasi kegagalan tersebut menghasilkan kondisi *fragmented state*, di mana negara tetap hadir, namun pelaksanaan kebijakan berjalan secara terpisah dan tidak terintegrasi dengan sistem digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *SIAPKE PATI* tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kata kunci: *SIAPKE PATI*, kemiskinan ekstrem, bantuan sosial, *policy failure*, *governance failure*, *fragmented state*.

ABSTRACT

This study examines the implementation of the SIAPKE PATI application in managing extreme poverty data and distributing social assistance in Pati Regency. A qualitative descriptive-analytical approach was employed, using interviews, observations, and documentation. The analysis is grounded in the policy design failure framework by B. Guy Peters and the concept of the fragmented state by Ronan Paddison. The findings reveal that SIAPKE PATI does not function as a primary policy instrument but merely as an administrative tool, as it is not integrated into core processes of data management and aid distribution. This reflects a policy failure due to instrument mismatch, reinforced by governance failure characterized by weak regulation, coordination, and oversight. Furthermore, these failures culminate in a fragmented state, where the state remains present but policy implementation operates in a disconnected and unintegrated manner from the digital system. The study concludes that SIAPKE PATI does not significantly contribute to the effectiveness of extreme poverty alleviation policy.

Keywords: *SIAPKE PATI*, extreme poverty, social assistance, *policy failure*, *governance failure*, *fragmented state*.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, eksklusi sosial, serta kerentanan struktural yang berkelanjutan. Secara konseptual, kemiskinan ekstrem merujuk pada kondisi individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal secara layak, yang dalam konteks global diukur melalui standar pengeluaran di bawah US\$1,9 *Purchasing Power Parity* (PPP) per hari. Dengan demikian, kemiskinan ekstrem tidak hanya menjadi persoalan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kapasitas negara dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, penghapusan kemiskinan ekstrem telah ditetapkan sebagai agenda strategis nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kebijakan ini menekankan pentingnya intervensi berbasis data terpadu sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program. Dalam kerangka tersebut, kualitas pengelolaan data menjadi elemen krusial, karena ketidaktepatan data akan berdampak langsung pada ketidaktepatan sasaran bantuan, inefisiensi program, serta potensi eksklusi kelompok rentan dari intervensi kebijakan.

Dalam praktiknya, tantangan utama dalam penanganan kemiskinan

ekstrem terletak pada fragmentasi data dan lemahnya integrasi antarinstansi. Kondisi ini terlihat secara empiris di Kabupaten Pati, di mana terjadi perubahan signifikan dalam data kemiskinan ekstrem, dari 10.860 jiwa menjadi 10.247 jiwa setelah verifikasi desa, dan kembali menurun menjadi 3.659 jiwa setelah verifikasi lanjutan oleh perangkat daerah. Perubahan data yang cukup drastis tersebut tidak hanya menunjukkan adanya proses pemurnian data, tetapi juga mengindikasikan persoalan mendasar terkait validitas, konsistensi, serta integrasi data kemiskinan ekstrem. Dengan kata lain, persoalan utama dalam kebijakan ini tidak semata terletak pada jumlah kemiskinan, tetapi pada bagaimana data tersebut diproduksi, diverifikasi, dan digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati mengembangkan inovasi kebijakan berbasis digital melalui aplikasi *SIAPKE PATI* (Sistem Informasi dan Aplikasi Pemantauan Kemiskinan Ekstrem Pati). Aplikasi ini dirancang sebagai sistem pengelolaan data berbasis *by name by address* yang bertujuan untuk mengintegrasikan data kemiskinan, mendukung penentuan sasaran bantuan, serta memperkuat monitoring dan evaluasi program secara terpusat. Secara konseptual, pengembangan aplikasi ini merepresentasikan upaya transformasi digital dalam tata kelola kebijakan publik, yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan. Penelitian Ramadhanty (2020), Purnia et al. (2019), dan Nugroho (2017) menekankan bahwa aplikasi digital mampu memperbaiki sistem pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi distribusi bantuan sosial. Sementara itu, penelitian Cantika dan Harapan (2021) serta Handayani et al. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, kapasitas sumber daya, serta koordinasi antar aktor dalam kerangka *e-government* dan *collaborative governance*.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih berorientasi pada keberhasilan (*success-oriented*) dan cenderung menempatkan teknologi sebagai solusi normatif dalam perbaikan tata kelola kebijakan. Berbagai permasalahan seperti ketidaksinkronan data, lemahnya koordinasi, serta rendahnya pemanfaatan aplikasi lebih sering diposisikan sebagai kendala implementasi, bukan sebagai indikasi kegagalan desain kebijakan. Padahal, dalam perspektif kebijakan publik, kegagalan tidak selalu disebabkan oleh implementasi yang lemah, tetapi dapat bersumber dari ketidaktepatan desain kebijakan itu sendiri, terutama dalam hal pemilihan instrumen, kesesuaian dengan konteks, serta integrasi dengan sistem kebijakan yang lebih luas.

Dalam konteks *SIAPKE PATI*, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa kebijakan ini menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaannya, seperti tidak adanya regulasi khusus yang mengikat, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi oleh perangkat daerah, serta tidak berkelanjutannya penggunaan aplikasi akibat perubahan kebijakan nasional menuju Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi, di mana aplikasi yang dirancang sebagai instrumen utama justru tidak menjadi bagian dari proses inti kebijakan di lapangan. Dengan demikian, permasalahan yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam desain kebijakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengambil posisi analitis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan perspektif *policy design failure* dari B. Guy Peters. Dalam kerangka ini, kegagalan kebijakan dipahami sebagai kegagalan dalam menghubungkan tujuan, instrumen, dan konteks kebijakan secara koheren. Peters membagi kegagalan kebijakan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu *policy failure* yang berkaitan dengan ketidaktepatan instrumen kebijakan, *governance failure* yang berkaitan dengan lemahnya tata kelola dan koordinasi antar aktor, serta *state failure* yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas negara dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan.

Dengan menggunakan kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya menganalisis bagaimana aplikasi *SIAPKE PATI* dilaksanakan, tetapi juga mengkaji secara kritis mengapa kebijakan tersebut tidak mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Pati, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kebijakan tersebut dalam perspektif *policy design failure*.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas kajian kegagalan kebijakan publik berbasis digital, serta kontribusi praktis dalam perbaikan desain kebijakan, khususnya dalam pengembangan sistem berbasis data untuk penanganan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Pati. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta dinamika implementasi kebijakan dari perspektif para aktor yang terlibat, sehingga memungkinkan analisis

yang kontekstual dan eksplanatif terhadap fenomena yang diteliti.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, yang dipilih secara purposif karena merupakan daerah yang mengembangkan inovasi kebijakan berbasis digital melalui aplikasi *SIAPKE PATI* dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam kebijakan, yang meliputi aktor perencana (Bapperida), pelaksana teknis (Dinas Sosial), pengelola sistem (Diskominfo), serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dari berbagai perspektif aktor kebijakan.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung terhadap proses implementasi kebijakan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta data statistik terkait kemiskinan ekstrem. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara untuk menggali pengalaman dan persepsi aktor, observasi untuk memahami praktik implementasi secara langsung, serta analisis dokumen untuk memperkuat konteks dan validasi data.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian

data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan secara simultan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan utama yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk menjaga kualitas data, penelitian ini menerapkan teknik validasi melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta evaluasi berdasarkan kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI*, tetapi juga memungkinkan analisis yang mendalam terkait kegagalan desain kebijakan dalam perspektif *policy design failure*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Pati, serta menjelaskan mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan optimal sebagai instrumen penanganan kemiskinan ekstrem. Untuk menjawab tujuan tersebut, pembahasan disusun secara integratif antara temuan empiris dan kerangka teori *policy design failure* dari B. Guy Peters, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga eksplanatif dan kritis.

Pelaksanaan *SIAPKE PATI* dalam Pengelolaan Data Kemiskinan Ekstrem

Secara normatif, pengelolaan data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati telah dirancang melalui mekanisme yang sistematis dan

berlapis, yang mencakup integrasi data, verifikasi dan validasi, penetapan data sasaran, serta penginputan ke dalam sistem aplikasi *SIAPKE PATI*. Mekanisme ini mengacu pada kebijakan nasional berbasis *by name by address*, yang menekankan pentingnya data individu sebagai dasar intervensi kebijakan.

Pada tahap awal, pemerintah daerah menghadapi persoalan ketidaksinkronan antara sumber data utama, yaitu DTKS dan P3KE. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan integrasi data melalui metode overlay, yang bertujuan menghasilkan basis data yang lebih komprehensif. Namun, data yang dihasilkan masih bersifat agregat dan belum dapat digunakan secara langsung, sehingga diperlukan proses verifikasi melalui musyawarah desa (musdes).

Hasil verifikasi menunjukkan adanya penyesuaian signifikan dari 10.860 jiwa menjadi 10.247 jiwa, yang kemudian kembali mengalami penyempurnaan melalui verifikasi lanjutan oleh perangkat daerah hingga menjadi 3.659 jiwa sebagai data final sasaran kebijakan. Penurunan ini menunjukkan bahwa proses data cleansing berjalan secara intensif, namun juga mengindikasikan adanya persoalan validitas data pada tahap awal.

Meskipun mekanisme tersebut secara desain telah mengakomodasi prinsip partisipatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan verifikasi di tingkat desa masih menghadapi potensi subjektivitas. Keterlibatan aktor lokal, seperti kepala desa, membuka ruang bagi bias kepentingan, sehingga

objektivitas data tidak sepenuhnya terjamin. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipatif tidak selalu berbanding lurus dengan akurasi data, terutama ketika tidak diimbangi dengan sistem kontrol yang kuat.

Meskipun *SIAPKE PATI* dirancang sebagai sistem utama dalam pengelolaan data, temuan empiris menunjukkan bahwa aplikasi tidak digunakan dalam proses produksi data. Berdasarkan observasi langsung penulis, aplikasi hanya digunakan sebagai media input terhadap data yang telah diverifikasi di luar sistem. Hal ini menunjukkan adanya *decoupling* antara desain sistem dan praktik implementasi, di mana aplikasi tidak menjadi bagian dari proses inti kebijakan, melainkan hanya berfungsi sebagai repositori administratif.

Kondisi ini diperkuat oleh rendahnya konsistensi penginputan data oleh perangkat daerah, yang menunjukkan bahwa sistem tidak terinternalisasi dalam struktur kerja birokrasi. Dengan demikian, meskipun secara normatif *SIAPKE PATI* dirancang sebagai sistem integratif, dalam praktiknya aplikasi belum mampu mengubah pola kerja pengelolaan data yang tetap bergantung pada mekanisme konvensional.

Pelaksanaan *SIAPKE PATI* dalam Pendistribusian Bantuan Sosial

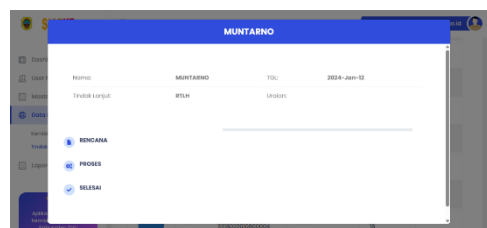
Dalam mekanisme pendistribusian bantuan sosial, *SIAPKE PATI* dirancang sebagai instrumen utama yang menghubungkan data sasaran dengan pelaksanaan intervensi. Data yang telah diverifikasi menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam

menentukan jenis bantuan, seperti bantuan sosial, perbaikan rumah tidak layak huni, jambanisasi, hingga pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, aplikasi juga dirancang untuk mencatat realisasi bantuan serta mendukung proses monitoring dan evaluasi secara terintegrasi. Secara konseptual, sistem ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah melalui penggunaan data tunggal.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi mekanisme ini belum berjalan optimal. Salah satu kendala utama adalah tidak konsistennya perangkat daerah dalam melakukan input data realisasi bantuan. Ketiadaan mekanisme pengawasan dan kontrol menyebabkan penggunaan aplikasi tidak menjadi kewajiban yang mengikat, sehingga implementasi bersifat parsial.

Gambar 1. Tidak Adanya Dokumentasi Foto sebagai Bukti Realisasi Bantuan



Sumber: Bapperida Kabupaten Pati, 2025

Selain itu, ditemukan bahwa tidak seluruh data bantuan dilengkapi dengan dokumentasi sebagai bukti realisasi, khususnya dalam bentuk foto. Ketiadaan dokumentasi ini

menunjukkan bahwa aplikasi belum berfungsi sebagai sistem monitoring yang reliabel. Proses pengawasan bantuan masih dilakukan melalui mekanisme di luar sistem, seperti laporan manual dan koordinasi langsung.

Kondisi ini menegaskan bahwa *SIAPKE PATI* belum berfungsi sebagai governance tool dalam arti substantif, melainkan hanya sebagai alat administratif yang tidak memiliki daya kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara desain sistem yang integratif dengan realitas implementasi yang masih bersifat konvensional.

Analisis Policy Design Failure

1. Policy Failure

Dalam perspektif B. Guy Peters, kegagalan kebijakan terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan, instrumen, dan konteks implementasi. Dalam kasus *SIAPKE PATI*, kegagalan tersebut terutama terlihat dalam bentuk instrument mismatch. Pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan kebijakan yang membutuhkan intervensi langsung, sementara *SIAPKE PATI* dirancang sebagai instrumen berbasis data. Ketidaksesuaian ini menyebabkan aplikasi tidak memiliki peran langsung dalam proses intervensi, sehingga tidak mampu berfungsi sebagai instrumen utama kebijakan.

Selain itu, ditemukan adanya *policy–outcome decoupling*, di mana *outcome* kebijakan tetap tercapai melalui mekanisme lain, sementara aplikasi tidak berkontribusi secara signifikan. Hal ini menunjukkan

bahwa *SIAPKE PATI* tidak memiliki relevansi kausal dalam menghasilkan *outcome* kebijakan.

Kegagalan juga terlihat dari aspek keberlanjutan, di mana aplikasi tidak mampu bertahan dalam perubahan kebijakan nasional menuju DTSEN. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak dirancang adaptif terhadap konteks *multi-level governance*. Selain itu, rendahnya tingkat pemanfaatan aplikasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara sumber daya yang digunakan dan manfaat yang dihasilkan. Dengan demikian, *SIAPKE PATI* dapat dikategorikan sebagai *policy failure* yang bersifat struktural, karena kegagalan tidak hanya terjadi pada implementasi, tetapi berakar pada desain kebijakan itu sendiri.

2. Governance Failure

Kegagalan pada level instrumen kemudian berimplikasi pada kegagalan tata kelola. Dalam penelitian ini, *governance failure* tercermin dari beberapa aspek utama. Pertama, tidak adanya regulasi formal yang mengatur implementasi aplikasi menunjukkan adanya institutional void. Tanpa dasar hukum yang jelas, kebijakan tidak memiliki daya paksa dalam birokrasi. Kedua, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah menunjukkan adanya *coordination failure*, di mana kebijakan tidak mampu mengintegrasikan aktor secara horizontal.

Ketiga, terdapat kesenjangan antara kapasitas dan kepatuhan (*capacity–compliance gap*), yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tidak diikuti oleh mekanisme kontrol.

Keempat, ketidaksinkronan antara kebijakan daerah dan nasional menunjukkan adanya *vertical misalignment*, yang menyebabkan kebijakan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, kegagalan *SIAPKE PATI* tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan kegagalan tata kelola yang bersifat sistemik.

3. *State Failure*

Akumulasi dari *policy failure* dan *governance failure* menghasilkan kondisi *fragmented state*. Negara tetap hadir melalui berbagai program, tetapi tidak mampu mengintegrasikan kebijakan dalam satu sistem yang koheren. Program penanganan kemiskinan tetap berjalan, namun tidak terhubung dengan aplikasi *SIAPKE PATI*. Hal ini menunjukkan adanya fragmentasi horizontal antar perangkat daerah dan fragmentasi vertikal antara pemerintah daerah dan pusat.

Keberhasilan program lebih ditentukan oleh mekanisme konvensional, bukan oleh sistem digital. Dengan demikian, inovasi kebijakan tidak menghasilkan transformasi tata kelola, melainkan hanya menjadi simbol administratif. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan *SIAPKE PATI* merupakan kegagalan yang bersifat berlapis dan sistemik. Kegagalan pada level instrumen (*policy failure*) menyebabkan aplikasi tidak relevan dalam praktik kebijakan. Kegagalan ini diperkuat oleh kelemahan tata kelola (*governance failure*), yang ditandai oleh ketiadaan regulasi, lemahnya koordinasi, dan rendahnya kepatuhan implementasi. Akumulasi dari kedua

kondisi tersebut menghasilkan fragmentasi kebijakan (*state failure*), di mana kebijakan berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi.

Dengan demikian, kegagalan inovasi kebijakan digital dalam penelitian ini tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai konsekuensi dari desain kebijakan yang tidak mampu menghubungkan tujuan, instrumen, aktor, dan konteks secara koheren.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi *SIAPKE PATI* dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Pati belum berjalan optimal sebagai instrumen utama kebijakan. Secara empiris, aplikasi tidak terintegrasi dalam proses inti kebijakan, melainkan hanya berfungsi sebagai media input dan dokumentasi administratif dari data yang telah diverifikasi melalui mekanisme konvensional seperti musyawarah desa, verifikasi lapangan, dan koordinasi antar perangkat daerah. Dalam praktiknya, baik pengelolaan data maupun pendistribusian bantuan sosial tetap berlangsung di luar sistem aplikasi, sehingga *SIAPKE PATI* tidak memiliki peran operasional yang menentukan dalam proses kebijakan.

Dalam perspektif *policy design failure* dari B. Guy Peters, kondisi ini mencerminkan kegagalan kebijakan yang bersifat struktural. Pada level *policy failure*, terdapat ketidaktepatan instrumen (*instrument mismatch*) antara tujuan kebijakan yang

menuntut intervensi langsung dengan instrumen yang berbasis pengelolaan data, sehingga aplikasi tidak memiliki keterkaitan kausal dengan *outcome* kebijakan (*policy–outcome decoupling*). Kegagalan ini diperkuat oleh *governance failure*, yang ditandai oleh ketiadaan regulasi yang mengikat, lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta tidak adanya mekanisme pengawasan yang mampu memastikan konsistensi implementasi.

Akumulasi dari kegagalan tersebut menghasilkan kondisi *state failure* dalam bentuk *fragmented state*, di mana negara tetap hadir dalam penanganan kemiskinan ekstrem, namun kebijakan berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi dengan sistem digital yang dibangun. Dengan demikian, *SIAPKE PATI* tidak berfungsi sebagai instrumen transformasional dalam tata kelola kebijakan, melainkan hanya menjadi alat administratif yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pengelolaan data maupun ketepatan distribusi bantuan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan inovasi kebijakan berbasis digital tidak semata disebabkan oleh faktor teknis, tetapi merupakan konsekuensi dari desain kebijakan yang tidak mampu menghubungkan tujuan, instrumen, aktor, dan konteks secara koheren dalam satu sistem kebijakan yang terintegrasi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa aplikasi *SIAPKE PATI* belum berfungsi

optimal sebagai instrumen kebijakan dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem dan pendistribusian bantuan sosial.

Pertama, pada aspek desain kebijakan, Pemerintah Kabupaten Pati perlu memastikan kesesuaian antara tujuan kebijakan dan instrumen yang digunakan (*policy design alignment*). Inovasi digital tidak cukup dirancang sebagai sistem pendukung administratif, tetapi harus terintegrasi dalam proses inti kebijakan sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan intervensi program. Selain itu, diperlukan penguatan dasar regulasi melalui Peraturan Bupati dan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kebijakan memiliki daya ikat dan kejelasan struktur kelembagaan .

Kedua, pada aspek tata kelola, Bapperida sebagai *leading sector* perlu memperkuat fungsi koordinasi, pengawasan, dan pengendalian implementasi kebijakan lintas perangkat daerah. Penggunaan sistem aplikasi harus didukung oleh mekanisme kontrol yang jelas, sehingga tidak bergantung pada inisiatif individu, melainkan menjadi kewajiban kolektif dalam birokrasi.

Ketiga, pada aspek pengembangan sistem, Diskominfo perlu mengembangkan aplikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai media *input* data, tetapi juga sebagai *governance tool* yang mampu mendukung monitoring, evaluasi, serta integrasi kebijakan secara menyeluruh. Penguatan fitur sistem, termasuk integrasi data lintas sektor, dokumentasi berbasis bukti, serta kompatibilitas dengan sistem

nasional seperti DTSEN, menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan kebijakan.

Keempat, pada level implementasi, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas verifikasi dan validasi data melalui musyawarah desa dengan menjamin objektivitas dan akurasi data. Selain itu, pemutakhiran data secara berkala perlu dilakukan agar data yang digunakan dalam kebijakan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Kelima, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai kegagalan kebijakan berbasis digital, baik melalui pendekatan komparatif antar daerah maupun pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak dan efisiensi kebijakan. Hal ini penting untuk memperkaya literatur mengenai hubungan antara inovasi digital, desain kebijakan, dan efektivitas kebijakan publik dalam konteks *e-government*.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini menegaskan bahwa keberhasilan inovasi kebijakan digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi oleh kualitas desain kebijakan, kekuatan tata kelola, serta tingkat integrasi kebijakan dalam sistem pemerintahan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapperida Kabupaten Pati. (2025). Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Pati Tahun 2024.
- Cantika, D., & Harapan, T. R. F. S. (2021). Element Sukses Pelaksanaan *E-Government* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(1), 43-52.
- Handayani, N., dkk. (2023). *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 13(1), 66-77.
- Nugroho, A. P. K. (2017). *Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Aplikasi "Madani Sinangkis" di Kota Serang)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Purnia, D. S., Syaifur, R., & Achmad, R. (2019). Pengembangan Implementasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Mobile pada Dinas Sosial. *Indonesian Journal on Computer and Information Technology*, 4 (2), 162-170.
- Ramadhanty, F. A. (2020). *Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Aplikasi Simnangkis KISSME (Kolom Informasi keSejahteraan Sosial Masyarakat secara Elektronik) di Kota Magelang)*. Skripsi, Universitas Tidar.